

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA WISATA DI KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Aldivon Atok Pratidina Santoso*, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indonesia; e-mail: aldivon123@gmail.com

*Correspondence

Received: 23-11-2022; Accepted: 30-11-2022; Published: 30-11-2022

Abstrak: Desa Wisata merupakan suatu model pengembangan wisata dengan memanfaatkan potensi dalam bentuk pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek kehidupan yang sudah ada. Desa Wisata saat ini merupakan salah satu program Pemerintah Kota Semarang yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang dialami masyarakat desa dengan mengembangkan potensi dan keunikan pada masing-masing desa di wilayah Kota Semarang serta dalam pelaksanaannya melibatkan keikutsertaan dan kemampuan masyarakat lokal. Adapun lokus penelitian ini adalah Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati telah menjalankan dan mengembangkan program Desa wisata tersebut. Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati sudah dilakukan dengan baik. Sudah terdapat upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata dengan menghadirkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta sudah terlaksana pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Kandri. Namun, ada kekurangan dimana di bagian pendanaan serta promosi. Saran kepada Pemerintah Kelurahan Kandri yaitu dengan mengadakan pelatihan pemanfaatan teknologi serta manajemen untuk promosi Desa Wisata Kandri melalui social media dan sebagainya.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Kelurahan Kandri.

Abstract: *Tourism Village is the utilization of potential in the form of tourism development while still paying attention to the existing aspects of life. Tourism Village is currently one of the Semarang City Government programs aimed at overcoming the problems of poverty and unemployment experienced by rural communities by developing the potential and uniqueness of each village in the Semarang City area and in its implementation involves the participation and ability of local communities. The locus of this research is Kandri Village, Gunungpati District, which has run and developed the tourism village program. The research design used is by using qualitative research. Data was collected by observation, interviews, documentation, and triangulation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of research on Community Empowerment through the Tourism Village Program in Kandri Village, Gunungpati District have been carried out well. Based on the results of observations, interviews, and documentation in the field, there have been government efforts to improve community empowerment through the Tourism Village Program by presenting the facilities and infrastructure needed and the development of human resources by the Kandri Village Government has been carried out. However, there are shortcomings in terms of funding and promotion. Suggestions to the Kandri Village Government are to conduct training on the use of technology and management for the promotion of Kandri Tourism Village through social media and so on.*

Keywords: *Community Empowerment, Tourism Village, Kandri Village*

I. Pendahuluan

Kondisi ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Masalah ini merupakan salah satu permasalahan yang telah cukup lama terjadi dan turun temurun. Di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi masyarakat masih menunjukkan angka yang tergolong rendah dibanding negara lainnya, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan penurunan persentase pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang mencapai 5,17% lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya mencapai 5,02% (<https://www.bps.go.id/>). Untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 6 menyebutkan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat dapat terbantu dengan pengembangan dan peningkatan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang

NO	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentasi Penduduk Miskin
1	2018	73,06	4,14
2	2019	71,97	3,98
3	2020	79,58	4,34

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2021

Kota Semarang sendiri dengan jumlah penduduk 1.053.094 jiwa pada tahun 2020 tercatat terdapat sebanyak 79,9 ribu jiwa yang mengalami kemiskinan. (Kota Semarang Dalam Angka, 2021). Dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat yang menghasilkan solusi yang tepat. Solusi untuk mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dengan mewujudkan pemanfaatan potensi pariwisata yang ada di Kota Semarang. Salah satunya adalah melalui Program Desa Wisata. Dibentuknya Desa Wisata bertujuan untuk memanfaatkan potensi daya tarik wisata baik alam, budaya, maupun hasil buatan manusia yang ada dengan dukungan atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan luar daerah. Pemerintah Kota Semarang berencana untuk mewujudkan pemanfaatan potensi pariwisata yang ada di Kota Semarang salah satunya adalah penetapan Desa Wisata Kandri sejak tahun 2013. Pada tahun 2013 Walikota Semarang

melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 menetapkan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, 3 Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Namun, permasalahan kemiskinan belum dapat diatasi dengan maksimal, bahkan masih terjadi kenaikan masyarakat miskin. Pemerintah berharap dengan terwujudnya Program Desa Wisata dapat mengembangkan potensi daerah, masyarakat, Pemerintah Kelurahan, serta permasalahan kemiskinan di Kota Semarang dapat teratasi dengan mengangkat potensi di bidang sosial maupun ekonomi masyarakat lokal. Peran Pemerintah Kelurahan dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa Wisata Kandri melalui program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arahan dari Pemerintah Kota Semarang mempunyai tujuan salah satunya memberdayakan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi teoritis, artikel ini juga akan menambah referensi pemberdayaan masyarakat yang umumnya hanya berkuat pada teori-teori lama yang menekankan pada faktor eksternal semata (Rohmah 2017; Sofia 2021; Sujana, Al Zarliani, and Hastuti 2020). Sehingga diharapkan jurnal yang ditulis penulis akan memberikan perspektif baru dalam memandang proses pemberdayaan secara komprehensif.

II. Kajian Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka dalam Yunus (2017), “pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya”. Suharto (2017) menyatakan bahwa pemberdayaan ialah suatu kemampuan seseorang seperti orang yang lemah atau rentan agar mereka berkemampuan dalam:

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok sehingga mereka bebas dalam berpendapat, selain itu dapat terbebas dari rasa lapar, kebodohan, dan sakit;
- b) Terpenuhinya fasilitas yang memadai serta dapat mudah untuk dijangkau agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya serta dapat dengan mudah mengakses sarana prasarana untuk memperoleh kebutuhan barang dan jasa;
- c) Ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang berkelanjutan agar lebih berpikiran terbuka sehingga akan bijak dalam mengambil keputusan.

Penjelasan mengenai konsep pemberdayaan sesuai dengan pernyataan Anthony Bebbington dalam Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat dalam melakukan peningkatan terhadap harkat dan martabat pada lapisan masyarakat itu sendiri yang saat ini masih terperangkap dalam kemiskinan yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap tersebut serta keterbelakangan yang terjadi. Sehingga pemberdayaan dapat dikatakan sebagai memampukan serta menciptakan masyarakat yang mandiri dengan peran aktif dari masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat Menurut Slamet dalam Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019) diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang kemudian diartikan lebih lanjut sebagai:

Proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada di semua *stakeholders* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Dalam penjelasan tersebut sudah seharusnya dalam proses pemberdayaan dilakukan oleh beberapa komponen terkait yang terlibat mulai dari individu, kelompok dan kelembagaan serta terdapat partisipasi masyarakat dalam proses belajar bersama dengan tujuan terjadinya perubahan dalam diri masyarakat itu sendiri serta komponen terkait dengan harapan terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan. Menurut Wrihatnolo dalam Ariani, Bahri, Zaina (2016), konsep pemberdayaan masyarakat mencakup:

Pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pembangunan masyarakat (*Community development*) serta pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*Community-based development*) yang selanjutnya terdapat *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang dijalankan oleh masyarakat. Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat mencakup pembangunan yang digerakkan masyarakat dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019) yang mencakup:

1. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.
2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga atau kekerabatan.
3. Keragaman budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus memperlihatkan adanya keragaman budaya.
4. Perubahan budaya, artinya kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
5. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk selalu menawarkan setiap ilmu yang ingin diterapkan.
7. Belajar sambil bekerja, artinya kegiatan pemberdayaan harus belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.
8. Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang disesuaikan dengan sasarannya.
9. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepuasannya sendiri dan harus mengembangkan kepemimpinan.
10. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus.
11. Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.
12. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

Berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik jika masyarakat memiliki keinginan untuk melaksanakannya mulai dari lapisan terbawah sehingga pemberdayaan masyarakat dapat mencapai kepuasan dimana ada beberapa hal yang mempengaruhi

antara lain budaya, kerjasama, metode yang sesuai, kepemimpinan dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2019) dalam upaya pemberdayaan masyarakat terdapat tiga hal yang dilihat antara lain menciptakan kondisi dimana potensi masyarakat dimungkinkan untuk berkembang (*enabling*), memperkuat daya atau potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dan memberdayakan yang ketergantungan pada suatu program pemberian (*Charity*).

Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam Bahri (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instansi”. Teori mengenai tahap pemberdayaan menurut Wrihatnolo terdapat tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran, memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar keluar dari kemiskinan, target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” berupa penyadaran untuk hak akan sesuatu. Biasanya tahap ini dilakukan dengan pendampingan. Misalnya pada masyarakat miskin diberi pemahaman bahwa mereka berhak untuk menjadi masyarakat yang berada jika memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.
2. Tahap pengkapasitasan, memampukan masyarakat kurang mampu agar memiliki ketrampilan untuk mengambil peluang yang diberikan dengan melakukan pelatihan-pelatihan, dan kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan life skill. Tahapan ini biasa disebut dengan *capacity building*, atau lebih sederhananya disebut *enabling*.
3. Tahap Pendayaan, tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas

serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang disengaja dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peran aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang tersedia dimana yang ditekankan dalam pemberdayaan tersebut adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga pada akhirnya masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dengan kemampuan yang didapatkannya serta tidak bergantung dengan program pemberian pemerintah.

Pemberdayaan sendiri merupakan sebuah proses dan bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Proses pemberdayaan sendiri terdiri dari tahap penyadaran, pengkapasitasan, serta tahap pendayaan. Selain itu, pemberdayaan juga dapat mewujudkan pembangunan fisik maupun non fisik (pelatihan keterampilan). Sumber dana yang digunakan dalam proses pemberdayaan didapatkan dari berbagai sumber antara lain pemerintah, partisipasi pihak swasta, maupun swadaya dari masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep pemberdayaan menurut pendapat oleh Wrihatnolo untuk dijadikan operasionalisasi konsep.

2. Desa Wisata

Suwantoro dalam Taolin dan Nugroho (2016) mengemukakan bahwa desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik tata ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial budaya masyarakat, adat istiadat keseharian. Di samping itu, mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cendera mata, dan atraksi-atraksi wisata. Berdasarkan definisi

desa wisata hal yang penting dalam pengembangan desa wisata antara lain ketersediaan akomodasi, makanan dan minuman, cendera mata, serta atraksi wisata.

Menurut Muliawan dalam Hayat dan Zaini (2018), dijelaskan bahwa desa wisata merupakan suatu desa yang berpotensi dalam daya tarik wisata yang khas serta memiliki keunikan baik berupa kehidupan sosial budaya kemasyarakatan maupun karakteristik fisik lingkungan alam pedesaan yang diolah dan disajikan secara menarik dan alami dengan mengembangkan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang terencana dan harmonis serta dikelola dengan baik sehingga dapat menerima dan menggerakkan kunjungan wisata ke desa tersebut, selain itu, desa tersebut juga harus mampu menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Sedangkan menurut Inskeep dalam Hadiwijoyo (2018), desa wisata dapat diartikan sebagai suatu tempat yang memiliki karakteristik dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat terkhusus terhadap kehidupan pedesaan, dengan melihat hal tersebut menunjukkan bahwa daya tarik utama dari sebuah Desa Wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata merupakan pemanfaatan potensi dalam bentuk pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek kehidupan yang sudah ada pada desa tersebut. Lebih menekankan pada pemanfaatan kemampuan serta potensi yang tersedia di desa tersebut untuk menyediakan serangkaian perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung.

Menurut Muliawan dalam Hayat dan Zaini (2018) terdapat beberapa kriteria dari desa wisata diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas (sebagai atraksi wisata), baik berupa karakteristik fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan.
2. Memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan kegiatan wisata pedesaan, yang antara lain dapat berupa: akomodasi/penginapan, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan/tamu, atau fasilitas pendukung lainnya.
3. Memiliki interaksi dengan pasar (wisatawan) yang tercermin dari kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut.
4. Adanya dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat terhadap pengembangan desa tersebut terkait dengan kegiatan kepariwisataan (sebagai desa wisata).

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, Kelurahan Kandri sudah memenuhi kriteria yang dapat dikatakan bahwa Kelurahan Kandri merupakan Desa Wisata. Daya Tarik dari kehidupan sosial budaya kemasyarakatan dan kesenian di Kelurahan Kandri yaitu seperti sesaji rewanda, kempling kemanak, dan nyadran sendang yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat sekitar sebagai budaya yang unik.

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) sumber data, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus (Sugiyono 2018). Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi di tempat yang menjadi lokus penelitian yaitu Desa Wisata Kandri dan melaksanakan wawancara menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan snowball sampling dengan jumlah 10 informan yang terdiri dari kepala wilayah Kelurahan Kandri (Lurah Kandri atau yang

mewakili), Kasi Pembangunan Kelurahan Kandri, Perwakilan Kelompok Sadar Wisata Kandri (sejumlah 5 orang yang terdiri dari 5 pengurus dan anggota), serta Masyarakat Kelurahan Kandri (sejumlah 3 orang). Adapun dalam analisisnya menggunakan teori Randy R Wrihatnolo (dalam Bahri 2019) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses dan bukan sebuah sesuatu yang instan dengan di dalamnya terdiri dari tahap penyadaran, pengkapasitasan, serta pendayaan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Peneliti menganalisis proses pemberdayaan masyarakat Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri menggunakan pendapat dari Randy R Wrihatnolo (dalam Bahri 2019) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses dan bukan sebuah sesuatu yang instan dengan di dalamnya terdiri dari tahap penyadaran, pengkapasitasan, serta pendayaan. Adapun pembahasannya dapat dilihat pada subbab berikut.

a. Tahap Penyadaran

Peneliti melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait tahap penyadaran pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri dengan dua indikator yaitu pemahaman akan masa depan individu serta timbul kesadaran diri dari masyarakat. Terkait indikator yang pertama yaitu pemahaman akan individu, pemerintah Kelurahan Kandri bersama dengan Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis telah melakukan pelatihan serta sosialisasi yang terdiri dari pelatihan spiritual ESQ yang diselenggarakan oleh DISBUDPAR Kota Semarang serta sosialisasi anti narkoba yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Karang Taruna Kelurahan Kandri yang dijelaskan dalam sesi wawancara yang dilakukan dengan Ibu Setyaninginsih selaku perwakilan Lurah Kandri bahwa “Melalui beberapa pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kelurahan Kandri melalui Kerjasama dengan beberapa Dinas Kota Semarang diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi sadar akan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat terkait masa depan masyarakat tersebut melalui program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Program Desa Wisata.” Hal ini juga sudah diterapkan di Kelurahan Kandri dimana masyarakat sudah memiliki kesadaran akan masa depannya masing-masing. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Endang Sulistiowati selaku masyarakat Kelurahan Kandri bahwa “Masyarakat disini sudah memiliki bagiannya masing-masing, keadaan disini sudah tertib dan melaksanakan pekerjaannya masing-masing ada yang bekerja dan masih proses belajar, ada yang bekerja sebagai penjual, ojek, dan juga bekerja di pokdarwis.” Terkait indikator yang kedua yaitu timbul kesadaran diri, masyarakat di

Kelurahan Kandri sendiri sudah memiliki kesadaran dari dalam diri yang timbul dari hasil sosialisasi serta pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kandri dimana hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Setyaningsih selaku perwakilan Lurah Kandri bahwa “Pada awalnya masyarakat belum ada kemauan karena masyarakat belum mengerti manfaat dari program desa wisata ini. Setelah kami lakukan sosialisasi dan pelatihan terkait desa wisata kepada masyarakat, masyarakat berangsur-angsur mulai menyesuaikan dan mengikuti program ini dengan keinginannya sendiri. Pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga masyarakat terlihat cukup antusias.” Hal ini diperkuat dengan pendapat Bapak Syaiful selaku Ketua Pokdarwis bahwa “Awal dari rencana desa wisata adalah pada awal pembuatan waduk jatibarang yang menenggelamkan lahan-lahan produktif di Kelurahan Kandri. Masyarakat yang awalnya memiliki mata pencaharian sebagai petani terpaksa harus beralih profesi. Pada awalnya memang banyak yang keberatan. Namun sekarang, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk bergabung dalam Program Desa Wisata setelah merasakan manfaat dari Program Desa Wisata ini.” Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait indikator kesadaran masyarakat pada dimensi penyadaran peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat yang awalnya keberatan dengan adanya Program Desa Wisata berangsur-angsur mulai memiliki kesadaran dari dalam diri karena telah merasakan manfaat dari program ini. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

b. Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap pengkapasitasan peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan menemukan beberapa hasil penelitian terhadap beberapa indikator yang terdiri dari pelatihan atau training, peningkatan life skill, serta peningkatan hard skill dan soft skill. Dalam indikator pelatihan atau training peneliti menemukan bahwa pelatihan atau training telah dilaksanakan melalui Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas, Pemerintah Kota Semarang, serta perguruan tinggi dimana pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan seni wayang suket, seni tari, sablon, bordir, dan lain-lain. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Setyaningsih selaku perwakilan Lurah Kandri bahwa “Bentuk pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kelurahan kandri kepada masyarakat dalam program desa wisata adalah melalui kerjasama dengan dinas Pemerintah Kota Semarang, perguruan tinggi, dan narasumber yang dipercaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Dengan berbagai bentuk pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang untuk persiapan dan pelaksanaan desa wisata.” Hal ini diperkuat dengan pendapat Ibu Sri Sukaryati selaku kasi pembangunan Kelurahan Kandri bahwa “Bentuk pelatihan yang dilakukan adalah

dengan melakukan pelatihan langsung berupa pelatihan keahlian seperti mengolah bahan baku lokal, pembuatan pernak pernik, pelatihan manajemen, dan lain lain. Upaya pemerintah kelurahan sebagai aparat adalah memberikan dukungan serta memberikan support melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan homestay yang memberdayakan pemuda-pemuda yang dilatih oleh narasumber terpercaya memiliki keahlian tertentu sehingga kualitas masyarakat dapat meningkat.” Pada indikator yang kedua yaitu peningkatan life skill sudah dilakukan upaya oleh Pemerintah Kelurahan Kandri yaitu dengan diadakannya berbagai pelatihan dan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait pembuatan desa wisata. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Syaiful pada sesi wawancara selaku ketua Pokdarwis bahwa “Awal dari rencana desa wisata adalah pada awal pembuatan waduk jatibarang yang menenggelamkan lahan-lahan produktif di desa kandri, mau tidak mau pemilik lahan yang notabene nya memiliki mata pencaharian petani, mau tidak mau harus beralih fungsi karena dialihfungsikan sebagai waduk sebagai pengendali banjir, penyedia air, dan sebagai wisata. Petani yang terkena dampaknya harus beralih profesi ke arah pengolahan wisata. Oleh karena itu kami melakukan penyuluhan serta sosialisasi agar masyarakat dapat menerima, berpikir kritis, kreatif, dan dapat memecahkan masalahnya bersama-sama.” Menurut hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan life skill masyarakat memiliki antusias yang tinggi dimana hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Program Desa Wisata ini dengan baik. Hasil dari pelatihan ini selain berjalannya Program Desa Wisata ini dengan baik adalah adanya peningkatan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Indikator ketiga adalah peningkatan *hard skill* dan *soft skill*.

Dalam pelaksanaan program desa wisata, peningkatan *hard skill* dan *soft skill* dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan dengan berbagai dinas dan perguruan tinggi serta narasumber yang berkompeten di bidangnya 7 masing-masing. Dari pelatihan tersebut masyarakat menerima kemampuan antara lain aneka olahan makanan berbahan baku lokal, batik, serta benda karya khas Kandri. Selain itu masyarakat juga mendapatkan kemampuan Bahasa Inggris dan mengatur paket wisata guna mengembangkan Desa Wisata Kandri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Setyaningsih selaku Perwakilan Lurah Kandri bahwa “Setelah adanya pelatihan yang terdiri dari pelatihan guna meningkatkan *hard skill* dan *soft skill*, masyarakat menjadi lebih terampil dan mampu membuat aneka barang dan jasa yang mampu meningkatkan taraf hidupnya sendiri melalui produksi barang dan paket wisata yang ada dalam Program

Desa Wisata.” Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, kegiatan terkait dimensi tahap pengkapasitasan bahwa Pemerintah Kelurahan Kandri bersama dengan Pokdarwis telah memberikan perhatian kepada masyarakat dalam pemberian pelatihan dan peningkatan kemampuan guna keberlangsungan kehidupan masyarakatnya yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh Desa Wisata Kandri. Menurut hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah peneliti lakukan berbagai penghargaan dan juara yang telah diraih oleh Desa Wisata Kandri serta program ini sudah berjalan dengan cukup baik. Melalui hal ini peneliti simpulkan bahwa pelatihan yang diberikan guna meningkatkan kemampuan masyarakat baik dalam peningkatan hard skill maupun soft skill sudah berhasil dilaksanakan dan hingga saat ini masih berlangsung.

c. Tahap Pendayaan

Pada tahap pendayaan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Kelurahan Kandri dianalisis menggunakan dua indikator yaitu mengidentifikasi peran masing-masing orang dalam pelaksanaan program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Terkait indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi peran masing-masing orang dalam pelaksanaan program. Hal ini sudah dilakukan dengan cukup baik namun masih terdapat kendala. Hal ini disampaikan oleh Ibu Setyaningsih sebagai Perwakilan Lurah bahwa “Pelaksanaan program desa wisata di kelurahan kandri sudah sesuai dengan tujuan dari program desa wisata dengan baik. Namun terkait hal ini masih terdapat kendala. Masyarakat memang sudah diberikan bagiannya masing-masing, namun tidak semua sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Karena keterbatasan pilihan, akhirnya masyarakat tetap melaksanakan bagiannya masing-masing.” Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Syaiful selaku ketua Pokdarwis bahwa “Sebenarnya masyarakat menginginkan kerja yang enak dengan modal sedikit dengan keuntungan yang banyak, akan tetapi untuk memuaskan semua orang bukan langkah yang mudah. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan OPD terkait seperti dinas pariwisata, dinas perindustrian, dinas perdagangan untuk mendampingi dan membekali masyarakat yang terkena dampak pengalih fungsian waduk. Pada awalnya masyarakat sudah diberi kuisisioner apa yang akan dilakukan setelah adanya pengalihan lahan, namun tidak semua keinginan dapat diwujudkan oleh pemerintah.” Menurut hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan terkait indikator identifikasi peran masing-masing masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Wisata dalam dimensi tahap pendayaan bahwa masyarakat sudah menjalankan peran di bagiannya masing-masing, walaupun tidak semua sesuai dengan keinginannya. Namun,

pelaksanaan Program Desa Wisata Kandri ini dapat tetap berjalan dengan baik. Kemudian pada indikator kedua yaitu Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat terkait dengan pembangunan desa wisata sudah tercapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Setyaningih selaku Perwakilan Lurah bahwa “Tujuan serta sasaran dari 8 Program Desa Wisata Kandri ini sudah tercapai yaitu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Kelurahan Kandri agar menjadi lebih baik. Ini bisa dilihat dari berbagai penghargaan dan juara yang diraih oleh Kelurahan Kandri terkait pemberdayaan masyarakat melalui program ini.” Hal ini didukung oleh hasil observasi peneliti dimana terlihat partisipasi masyarakat yang semakin baik, hal ini ditunjukkan melalui banyaknya UMKM serta kelompok kerja yang aktif di lingkungan Desa Wisata Kandri. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Kandri sudah terjadi peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata dimana dapat dilihat dari adanya peningkatan partisipasi masyarakat dimana hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya UMKM serta kelompok kerja yang ada di Desa Wisata Kandri.

Hasil utama dalam kegiatan pemberdayaan ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan melalui Program Desa Wisata melalui upaya Pemerintah Kelurahan Kandri dengan pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi serta pembuatan kelompok sadar wisata yang di dalamnya terdapat kelompok kerja sesuai dengan bagian masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ini menyediakan objek wisata dengan aneka keunikan khas lokal Kelurahan Kandri dengan berbagai fasilitas pendukungnya guna meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan wisata bagi pengunjung baik lokal maupun internasional.

V. Kesimpulan

Program Desa Wisata yang dilakukan di Kelurahan Kandri telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan tingkat kemiskinan serta membantu Pemerintah Kelurahan Kandri dalam pembangunan wilayah Kandri. Program ini sudah berjalan hingga saat ini dan dianggap berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan dalam segi ekonomi masyarakat serta dari segi pariwisata. Melalui Program Desa Wisata masyarakat dapat memaksimalkan ketersediaan seluruh potensi yang

dimiliki sehingga dapat membuat masyarakat dari luar berkunjung karena ciri khas, daya tariknya, serta nilai edukasi yang dimilikinya. Namun tidak semua indikator berjalan dengan baik, masih terdapat kendala dalam indikator tahap pendayaan berupa pembagian kerja yang belum sepenuhnya sesuai keinginan masyarakat. Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri telah mampu untuk membantu Pemerintah Kota Semarang dalam mengurangi dan menekan jumlah penduduk miskin. Walaupun demikian, masih banyak kendala dalam pelaksanaan Program Desa Wisata ini. Antara lain adalah: 1) Partisipasi masyarakat yang kurang di awal pembentukan Desa Wisata Kandri karena adanya pandangan negatif terhadap tempat wisata yang biasanya digunakan untuk berbagai hal negatif seperti bolos sekolah bagi siswa yang masih sekolah, pacaran tidak sehat, melakukan kegiatan mesum, dan lainnya; 2) Adanya kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi sehingga beberapa objek wisata harus ditutup atau berhenti sementara untuk mengurangi penyebaran covid-19; 3) Terdapat masalah terkait pendanaan dalam berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri; 4) Kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh pelaku pokdarwis serta Pemerintah Kelurahan Kandri dalam promosi Desa Wisata Kandri.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Kandri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata Kandri antara lain adalah: 1) Melakukan sosialisasi dan membuat dua kelompok sadar wisata yaitu kelompok Sadar Wisata Pandanaran dan Kelompok Sadar Wisata Suko Makmur sesuai dengan potensi daerah masing-masing; 2) Pembuatan paket wisata melalui Kelompok Sadar Wisata Pandanaran dan Kelompok Sadar Wisata Sukomakmur berupa paket wisata edukasi, kuliner, cinderamata, sosial dan budaya.

VI. Daftar Pustaka

- Ariani, Bahri, Zaina, Hana, Efri Syamsul, Zaina. 2016. "Analisis Pemberdayaan Petani Dhuafa (Studi Kasus Di Pertanian Sehat Indonesia)." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15(2): 275–94.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59388270/2016_-_Analisis_Pemberdayaan_Petani_Dhuafa_Studi_Kasus_Pertanian_Sehat_Indonesi_a20190525-73177-d8ib3e-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1669267677&Signature=N0kCHkyOvcZ0mxNsd0VnckZIKmk-RCJQW8WHPtgFUzDMOzZD~pMKZm.
- Bahri, Efri Syamsul. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2018. *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Suluh Media.

- Hayat, and Zaini. 2018. *Pencanangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan*. Malang: Inteligencia Media.
- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebiato. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rohmah, Nurul. 2017. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Inkubator Bisnis Baznas." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35047>.
- Sofia, Adib. 2021. "Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat Oleh 'Aisyiyah.'" *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 21(1): 45–58.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sujana, I Wayan, Wa Ode Al Zarliani, and Hastuti Hastuti. 2020. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pengolahan Rumput Laut." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* 4(1): 24–33.
- Taolin, Arichtia Praevianti, and Saptono Nugroho. 2016. "Potensi Heritage Yang Dimiliki Oleh Desa Wisata Tamkesi Kabupaten Timor Tengah Utara Sebagai Daya Tarik Wisata." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 4(2): 96–99.
- Yunus, Saifudin. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).